

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
MASALAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
(Studi Kasus Putusan No. 080/G/2015/Ptun.Smg)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

KRISTIN EKO MURDIYANINGSIH
C.100.130.255

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
MASALAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
(Studi Kasus Putusan No. 080/G/2015/Ptun.Smg)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

KRISTIN EKO MURDIYANINGSIH
C.100.130.255

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
MASALAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
(Studi Kasus Putusan No. 980/G/2015/Ptun.Smg)

Oleh:

KRISTIN EKO MURDIYANINGSIH
C.100.130.255

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 04 Agustus 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Iswanto, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Juli 2017

Penulis



Kristin Eko Murdiyaningsih
C100130255

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
MASALAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
(Studi Kasus Putusan No. 080/G/2015/Ptun.Smg)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dalam Putusan No. 080/G/2015/PTUN.Smg dilihat dari prinsip kompetensi absolut PERATUN dan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa izin prinsip penanaman modal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen-dokumen hukum lainnya, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dilihat dari prinsip kompetensi absolut PERATUN adalah sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terkait dengan Putusan Tata Usaha Negara antara PT. Amira sebagai Penggugat dengan Kepala BPMPT Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat mengenai Surat Keputusan Nomor 348/3301/IP/I/ PMDN/2014 secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa Putusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa izin prinsip Penanaman Modal dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat.

Kata kunci: *pertimbangan hakim, sengketa tata usaha negara, penanaman modal*

Abstract

This study aims to determine the case of dispute permit of investment principle in Decision Letter Number 080/G/2015/PTUN.Smg seen from the principle of absolute competence PERATUN and to know the judge's judgment analysis in deciding dispute permit principle of investment. The research method used a descriptive normative juridical approach. Sources of data derived from secondary data comprised of primary and secondary law sources. Methods of data collection with literature study and other legal documents, then the data are analyzed qualitatively. The result of the research shows that the issue of dispute case of investment principle permit is seen from the principle of absolute competence of PERATUN is in accordance with the State Administration Judicature Law and Government Administration Law. Related to the Decision of State Administration between PT. Amira as Plaintiff with Head of BPMPT of Cilacap Regency as Defendant regarding Decision Letter Number 348/3301/ IP/I/ PMDN/2014 as a whole is in accordance with laws and regulations, so it indicates that the Decision of State Administration can be legally accountable. The legal considerations of the judge in deciding the dispute permit principle of capital investment with the verdict rejected the Plaintiff's.

Keywords: *judge's consideration, state administrative dispute, investment*

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) merupakan sebuah institusi yang cukup penting keberadaannya dalam kehidupan sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), yang erat dicirikan oleh adanya pembatasan dan pengawasan (*control*) terhadap setiap aspek tindakan pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang, dalam kehidupan masyarakat sekarang ini lewat program pembangunan nasional bagi terciptanya negara kesejahteraan (*welfare state*), yang memang memerlukan kelincahan yang lebih besar dibandingkan dalam suatu negara di mana pemerintah hanya bersikap sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan yang dilanggar.¹

Kewenangan Absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"²

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

¹Paulus Effendi Latulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 1.

²*Ibid.*, hal. 6.

Nomor 51 Tahun 2009 merumuskan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan meliputi: (1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (4) Bersifat final dalam arti lebih luas; (5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau; (6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Masalah mengenai Sengketa Tata Usaha Negara salah satunya yaitu sengketa yang tercantum dalam Putusan Nomor 080/G/2015/PTUN.Smg. Kasus sengketa tersebut bermula ketika Penggugat yaitu PT. Amira Sinergi Ferrindo mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Tergugat yaitu Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap.

Terhadap permohonan Izin Prinsip yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Izin tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan alasan bahwa sudah keluar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 348/3301/IP/I/PMDN/2014 tanggal 09 september 2014 atas nama PT. Primandiri Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk: (1) Mengetahui kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dalam Putusan No. 080/G/2015/PTUN.Smg dilihat dari kompetensi absolut Peratun; (2) Mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa izin prinsip penanaman modal. Adapun manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah: (1)

Manfaat Teoritis. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara; (2) Manfaat Praktis, (a) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, karena dengan adanya penelitian ini memberi pemahaman mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara tentang izin prinsip penanaman modal dan (b) Sebagai masukan bagi badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kabupaten Cilacap, pejabat terkait, pegawai serta lembaga peradilan (PTUN).

2. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif.³ Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persoalan Kasus Sengketa Izin Prinsip Penanaman Modal Dilihat dari Kompetensi Absolut Peratun

Setiap proses sengketa Tata Usaha Negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan dimana tergugat bertempat kedudukan. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 35.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: (1) Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; (2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; (3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.⁴

Pasal 53 ayat 1 yang dimaksud Penggugat adalah: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.” Sedangkan yang dimaksud dengan Tergugat tercantum dalam Pasal 1 angka 6 bahwa: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Tergugat dalam hal ini berwenang menerbitkan Izin Prinsip kepada PT. Primandiri Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap yang menyebutkan bahwa Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala

⁴Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 99

BPMPT antara lain Izin Prinsip Penanaman modal, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kewenangan yang bersifat delegatif.

Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kompetensi Absolut menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antara badan-badan Peradilan seperti apa yang berwenang mengadili suatu sengketa. Sebagaimana dalam Pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal tersebut menyatakan bahwa kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas, yakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, yang dimana pengadilan wajib memutus paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan diajukan.

Kompetensi absolut berhubungan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa.⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut, ada yang mengatakan bahwa dengan kompetensi absolut, maka yang menjadi objek sengketa Peradilan TUN adalah perbuatan Pemerintah yang “*mengeluarkan keputusan (Beschikking)*”⁶.

Persoalan mengenai kasus Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor: 080/G/2015/PTUN.Smg tentang Izin Prinsip Penanaman Modal tersebut dapat dikaitkan dengan Kompetensi Absolut Peratun yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa batasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) umum sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara yang masuk dalam Kompetensi Absolut Peratun adalah: (1) Penetapan tertulis, (2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, (3) Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, (4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (5) Bersifat konkret, individual,

⁵Victor Yaved Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 32-33.

⁶SF Marbun, 2011, *Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: FH. UII Press, hal. 61.

final, dan (6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: (1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (4) Bersifat final dalam arti lebih luas; (5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau; (6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Keputusan obyek sengketa Fiktif Positif, Berdasarkan pada pasal tersebut, Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.

Disebutkan “fiktif” karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, sedangkan disebutkan “positif” karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan disebutkan, apabila setelah mengajukan permohonan dengan persyaratan yang lengkap, dengan tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari pemohon tidak mendapat jawaban, apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, sedangkan hal itu menjadi kewenangan dan kewajiban badan atau pejabat pemerintahan, maka sikap diam tersebut dianggap bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Permohonan yang dikabulkan tersebut kemudian menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan ke Pengadilan agar permohonan yang dikabulkan tersebut segera dikeluarkan putusan atas penerimaan permohonan.

Dalam putusan Nomor: 080/G/2015/PTUN.Smg yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang tidak menetapkan

dan/atau melakukan keputusan perihal Izin Prinsip Penanaman Modal dengan alasan telah keluar Surat Keputusan Nomor: 348/3301/IP/I/PMDN/2014 atas nama PT. Primandiri. Terkait dengan sikap diam Tergugat yang tidak memberikan Keputusan Izin Prinsip Penanaman Modal dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja maka demi hukum dianggap dikabulkan secara hukum yang berdasarkan pada keputusan fiktif positif Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

3.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Sengketa Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Putusan Nomor: 080/G/2015/PTUN.Smg

Sebelum hakim menjatuhkan amar putusan untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.⁷ Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

Ratio Decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio Decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁸

Diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Alasan diajukannya gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu: (1)

⁷W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 16.

⁸R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 194.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan masalah nomor satu di atas dalam hubungannya dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, PT. Amira Sinergi Ferrindo (Penggugat) telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum Penggugat yaitu berupa “Badan Hukum Perdata” yang berkaitan dengan perusahaan beralamat di Komplek Perkantoran Graha Mas Permata No. AD/5, Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur. Sedangkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap juga telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum Tergugat, karena dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Sebagaimana telah dideskripsikan di atas bahwa Hakim menolak gugatan Penggugat, dalam arti bahwa Surat Keputusan objek sengketa tetap dinyatakan sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketanya. Untuk mengetahui ketepatan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dikemukakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan dapat berupa: (1) Gugatan ditolak; (2) Gugatan dikabulkan; (3) Gugatan tidak diterima; (4) Gugatan gugur.

Berdasarkan gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan menolak gugatan penggugat. Putusan berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah.⁹ Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat ditolak dan Surat Keputusan objek sengketa tetap dinyatakan sah.

⁹R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 192.

Terhadap pertimbangan hakim yang menerima eksepsi Tergugat terkait bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan adalah benar. Sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu adanya kepentingan Penggugat itu sendiri bersifat pribadi dan obyeknya dapat ditentukan serta Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keseluruhan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat adanya surat/akta otentik yang menunjukkan hubungan hukum langsung dengan objek sengketa atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar status hukum Penggugat dengan materi atau isi objek sengketa *a quo* atau adanya data pendukung tentang perubahan/penggantian/pemindahan hak atas status hukum yang didasarkan perjanjian atau kesepakatan tentang objek sengketa dalam kasus ini terkait telah terbitnya izin prinsip penanaman modal atas PT. Primandiri Indonesia (bukti P-1 = T1).

Dari segi Kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan Izin Prinsip kepada PT. Primandiri Indonesia berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap yang menyebutkan bahwa Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala BPMPT antara lain Izin Prinsip Penanaman Modal, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kewenangan yang bersifat delegatif.

Jika dilihat dari segi prosedural dan substansi materiil tindakan yang dilakukan oleh Tergugat belum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Cilacap, sehingga terdapat tindakan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat permohonan izin prinsipnya tidak dikeluarkan/diterbitkan atau izin prinsip yang telah diterbitkan kepada PT. Primandiri Indonesia telah menghalangi kepentingan penggugat atau pelaku usaha lain.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Hakim seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat. Tindakan atau sikap Tergugat atas permohonan Penggugat mengenai permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 9 Pebruari 2015 yang tidak dapat dikeluarkan/diterbitkan di area yang diminta adalah tidak tepat. Jika dilihat dari isi posita yang diajukan oleh Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang salah satunya yaitu melanggar Pasal 12 Ayat (1) dan (2) seharusnya dapat dipertimbangkan lagi oleh Hakim. Dalam kasus ini pihak PT. Primandiri sampai pada saat gugatan diajukan belum memiliki izin lokasi yang sudah seharusnya wajib dimiliki oleh pemegang izin prinsip penanaman modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Primandiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang izin prinsip dan seharusnya Tergugat memberikan sanksi terhadap PT. Primandiri yang sebaliknya Tergugat terkesan membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh PT. Primandiri dan sudah seharusnya Tergugat mencabut Izin Prinsip PT. Primandiri agar tidak mengganggu pihak lain yang akan menanamkan modalnya di lokasi tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dilihat dari kompetensi absolut PERATUN adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terkait dengan Putusan Tata Usaha Negara

antara PT. Amira sebagai Penggugat dengan Kepala BPMPT Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat mengenai Surat Keputusan Nomor 348/3301/IP/I/ PMDN/2014 secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi putusan maupun sistematika putusan, begitu juga dengan subyek dan obyek gugatan, serta kompetensi, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa Putusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa izin prinsip Penanaman Modal dalam Putusan Nomor: 080/G/2015/PTUN.Smg yang dengan Amar Putusan menolak gugatan Penggugat yang dalam hal ini penulis berpendapat seharusnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang salah satunya yaitu melanggar Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi berkaitan dengan kewajiban bagi pemegang izin prinsip untuk memiliki izin lokasi yang seharusnya dapat dipertimbangkan lagi oleh Hakim. Tergugat mengetahui bahwa pihak PT. Primandiri sampai pada saat gugatan diajukan belum memiliki izin lokasi yang sudah seharusnya wajib dimiliki oleh pemegang izin prinsip penanaman modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Primandiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang izin prinsip dan seharusnya Tergugat memberikan sanksi terhadap PT. Primandiri yang sebaliknya Tergugat terkesan membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh PT. Primandiri dan sudah seharusnya Tergugat mencabut Izin Prinsip PT. Primandiri agar tidak mengganggu pihak lain yang akan menanamkan modalnya di lokasi tersebut.

4.2 Saran

Pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pelaksanaan kegiatan penanaman modal harus dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan berpengaruh pada penerapan tata pemerintahan yang baik. Dengan terus melakukan pembenahan hukum serta menciptakan aparatur pemerintahan yang taat dan sadar hukum, maka fungsi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat akan secara maksimal dapat diwujudkan.

Ketiga, harus ada peningkatan kesedaran dan ketaatan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan agar kualitas produk-produk Administrasi Negara yang dihasilkan semakin dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.

Keempat, hakim dalam memutus sengketa-sengketa Tata Usaha Negara harus selalu mengikuti perkembangan hukum yang terjadi, sehingga putusannya akan selalu akurat dan tidak tertinggal dari peraturan-peraturan yang selalu berkembang.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tak dapat dibalas dengan apapun. Keluarga besarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HR., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Latulung, Paulus Effendi. 2013. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Marbun, SF. 2011. *Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: FH. UII Press.
- Neno, Victor Yaved. 2006. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjandra, W. Riawan. 1996. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan No. 080/G/2015/PTUN.Smg Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal